

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh kompetensi dasar sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap penyajian laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh berbagai peneliti, penulis akan mereview hasil penelitian terdahulu.

Dalam jurnal ilmiah Pujanira & Taman (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY. Penelitian ini dilakukan di 15 dinas daerah pemerintah daerah DIY. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada 120 responden pegawai penatausahaan keuangan. Peneliti menggunakan model regresi dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, 1) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, 2) penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, 3) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, 4) kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY.

Dalam jurnal ilmiah Mahardini & Miranti (2018), penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak dari penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten. Metode penelitian data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan kuesioner dengan teknik analisis data dengan menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas dan pengujian hipotesis dengan

menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Banten tahun anggaran 2015, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Banten tahun anggaran 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2018) ini bertujuan untuk melihat pengaruh langsung hubungan variabel independen pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kuesioner kepada pejabat penatausahaan keuangan di satuan perangkat kerja daerah di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hilir. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan SPSS v. 17. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam jurnal ilmiah Inapty & Martiningsih (2016), penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem internal sebagai variabel modetering, pengambilan data dilakukan dengan pengambilan sampel yang dilakukan dengan *purposive sampling* kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov NTB. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi dengan variabel modetering. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan peran audit internal berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan audit internal sebagai variabel modetering.

Dalam jurnal ilmiah Jati (2019), penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pengujian pada penelitian ini dengan cara membandingkan kualitas laporan keuangan daerah sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah dan setelah penerapan standar

akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Penelitian dilakukan di seluruh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012-2017 dengan total sampel 524 pemerintah daerah. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan uji beda rata-rata sampel berhubungan. Hasil analisis menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan diterapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Dalam jurnal ilmiah Nurhasanah, dkk (2018), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah daerah, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan kuesioner kepada staf di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 35 responder berlatar belakang akuntansi. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan sedangkan pengendalian internal secara parsial berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan secara bersama-sama penerapan standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardyansyah & Khalid (2016), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil uji dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi pada SKPD pada Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan pada 52 orang sebagai sampel yang menjabat sebagai kasubag keuangan dan bendahara di SKPD Kabupaten Polewali Mandar. Hasil dari penelitian ini yaitu kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan dengan pendekatan

selisih mutlak menunjukkan bahwa pengendali intern tidak dapat memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan pengendalian intern dapat memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudiarianti, Ulupui, & Budiasih, 2015) bertujuan dengan maksud menentukan dan mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh kompetensi SDM dalam penerapan SPIP dan SAP serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh pejabat administrasi keuangan unit pemerintah daerah (PPK-SKPD) Kabupaten Tabanan, data diperoleh dari 39 responden yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive*, dan analisis data menggunakan SmartPLS versi 3.2.1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, dkk, (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengelola barang milik negara. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dengan bantuan SEM. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terbukti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan juga pengelola barang milik negara namun untuk pemanfaatan teknologi informasi hanya berpengaruh pada kualitas laporan keuangan tanpa berpengaruh pada pengelola barang milik negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah & Zulkifli, (2018) ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efek dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan sampel 36 responden di instansi pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian ini dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* dengan bantuan SPSS versi 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual di kabupaten Gunung Kidul adalah positif signifikan terhadap laporan keuangan lokal namun

tidak signifikan terhadap laporan keuangan menyeluruh di Masyarakat Gunung Kidul.

(Cecilia, 2017). The purpose of this study to examine whether the financial accountability is affected by the internal control and managerial performance of local government in Indonesia. The population in this study using primary data from all local government unit of North Sulawesi province with 226 unit tool (SKPD). Number of sampel are 115 unit with the total 345 responden. The conclusion is implementation of internal control influence on financial accountability of local governments in Indonesia.

Anastasia Karina, Halim (2018). Purpose of this study is proving the impact of human resources competency and implementation of the regional financial accounting system towards regional financial statement quality empirically. The study used multiple regression analysis. Data collect by the questionnaire and interviewed. Regional financial units in salatiga city is the object of this research. Conclusion from this research found if human resources competency and implementation of the regional financial accounting system towards regional units in salatiga have a significant effect.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi menurut Moeherino (2010) adalah sebagai berikut : “kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seorang oada waktu periode tertentu”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2018 Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk itu dapat dirumuskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu pegawai yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dalam mencapai suatu tujuan baik perusahaan maupun instansi dalam pemerintahan. Jika seseorang memiliki kompetensi akan bekerja dengan keterampilannya dan pengetahuan yang dimiliki untuk bekerja secara cepat, mudah, intuitif dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk meminimalkan kesalahan. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam sebuah organisasi, untuk itu perlunya pengelolaan sumber daya yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.

Ada beberapa faktor yang diperlukan dalam penempatan sumber daya manusia yaitu :

a) Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang prestasi akademis pendidikan menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan.

b) Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja yang dimiliki seseorang cenderung menjadi kelebihan tersendiri bagi pekerja, pengalaman kerja seseorang membantunya dalam mengerjakan tugas yang telah diemban.

c) Kesehatan fisik dan mental

Sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, yang mana kapasitas harus dilihat dari kemampuan dalam mencapai kinerja untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Liza Rahayu, 2014).

Pada umumnya Kompetensi dibagi menjadi dua kelompok yaitu *soft compatance (generic competence)* dan kompetensi perbidang yaitu kemampuan seseorang terhadap pekerjaan tertentu. Untuk itu dalam menciptakan karyawan yang memiliki kinerja baik dan berkualitas perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM).

Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan hal-hal yang mencakup tentang pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri (Bartos Basar, 2012).

Kadarisman M, (2013) mengemukakan bahwa berdasarkan masa pelaksanaannya manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) *Pre Service Training* (Pelatihan Pra Tugas)

Pemberian pelatihan kepada calon karyawan baru untuk memulai bekerja yang bersifat pembekalan, untuk mengetahui tugas yang akan dibebankan kepada karyawan.

2) *In Service Training* (Pelatihan dalam Tugas)

Diberikan kepada karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan.

3) *Post Service Training* (Pelatihan Purna/Pasca Tugas)

Pelatihan ini diberikan pada karyawan yang akan menghadapi masa pensiunnya.

2.2.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun angka dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 ,dalam penutup disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ini berlaku maka dengan demikian peraturan lama dicabut.

Penerapan akuntansi berbasis akrual ini dilakukan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis akrual menuju kas menjadi penerapan SAP berbasis akrual. SAP berbasis Kas adalah SAP yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Laporan keuangan berbasis akrual ini dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi pemangku baik bagi pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan. Hal ini sebanding dengan prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Nikke Yusnita Mahardini, (2018) ada delapan prinsip yang digunakan dalam pemeritahan prihal akuntansi dan pelaporan keuangan yang adalah basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar.

a. Basis Akuntansi

Dalam laporan keuangan pemerintah basis akuntansi yang digunakan saat ini adalah basis akrual, baik untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam peraturan Undang-undang yang mewajibkan penyajian laporan keuangan berbasis kas maka entitas wajib melaporkan demikian.

Pada basis akrual untuk LO pendapatan diakui ketika hak dalam memperoleh pendapatan telah terpenuhi meskipun kas belum diterina di Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang menyebabkan penurunan nilai kekayaan bersih telah dipenuhi meskipun kas belum keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Di dalam LO terdapat pula pendapatan lain seperti pendapatan dari bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Pencatatan aset sejumlah pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset pada saat diperoleh, dan kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang nantinya diharapkan dapat dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*Realization*)

Pendapatan berbasis kas dalam pemerintah yang tersedia dan diotorisasi melalui anggaran pemerintah pada satu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang serta belanja pada periode tersebut. Laporan Realisasi Anggaran pada dasarnya masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka baik pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah adanya otorisasi melalui anggaran atau ketika telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Substansi dan realitas ekonomi perlu dalam menyajikan informasi dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang akan disajikan. Jika substansi transaksi atau peristiwa lain berbeda dengan aspek formalitasnya maka yang tersebut harus dilakukan pengungkapan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Pembagian periode dalam kegiatan akuntansi dan pelaporan perlu dilakukan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan sumber daya dapat ditentukan. Dalam pembagian periode biasanya dibagi dalam kelompok periode tahunan, periode bulanan dan periode semesteran.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Konsistensi merupakan penerapan perlakuan akuntansi yang sama pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Mengenai ini bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan pada satu metode akuntansi ke metode yang lainnya.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Dalam laporan keuangan informasi disajikan secara lengkap sehingga dapat digunakan oleh pengguna yang membutuhkan. Pengguna laporan keuangan

dapat memperoleh informasi yang ditempatkan di muka laporan keuangan (*on the face*) dan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan haruslah disajikan secara wajar. Dalam penyajian laporan keuangan yang wajar, pertimbangan sehat menjadi satu faktor yang diperlukan bagi penyusun laporan keuangan saat menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penerapan Peraturan Pemerintah ini masih bersifat sementara sebagaimana terdapat dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran berbasis kas, dalam peraturan perundangan ini pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual baik di provinsi maupun kota/kabupaten dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu pada Tahun 2015 yang juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah :

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan pernyataan standar adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta akrual untuk pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini menggunakan akuntansi berbasis kas.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan keuangan yang lazim. Pernyataan standar akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi, tidak termasuk perusahaan negara/daerah

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan yang disajikan dengan basis kas dan akrual.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yang dapat berupa pengakuan aset tetap, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas nilai penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar ini Adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur kewajiban yang meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutka

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12. PSAP 12 Laporan Operasional

Tujuan Pernyataan Standar ini Adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

13. PSAP 13, ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang mempertanggung jawabkan anggaran dimulai dari tahun 2010.

2.2.3. Pengendalian Internal Pemerintah

2.2.3.1. Pengendalian Internal

Pada sistem akuntansi informasi yang baik biasanya terdapat sistem pengendalian internal yang baik pula. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan dalam suatu perusahaan atau instansi, serta untuk meminimalkan resiko tersebut dengan menemukan kesalahan yang kemudian dapat dikoreksi.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Sedangkan pengertian sistem intern pemerintah yang kemudian disingkat dengan SSIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah seluruh struktur organisasi, seluruh metode dan cara yang tersusun serta seluruh ukuran yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik entitas, memeriksa ketepatan dan kebenaran pencatatan akuntansi, dan meningkatkan efisien operasi suatu entitas untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen (Basri Yeti Mutia, 2018). Pada pasal Undang-Undang Nomor 60 tahun 2008 pasal 3 tentang sistem pengendalian intern pemerintah terdapat 5 jenis unsur diantaranya sebagai berikut :

a) Lingkungan Pengendalian

Dalam menciptakan suasana lingkungan kerja yang baik dan nyaman maka perlu di laksanakan nya sistem pengendalian internal di dalam sebuah instansi atau perusahaan. Untuk menciptakan hal tersebut maka dimulai dari pimpinan instansi. Pemimpin wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Dengan memberikan contoh dan sikap yang baik maka pegawai dengan turut serta memberikan lingkungan yang nyaman.

b) Penilaian Resiko

Penilaian resiko yang dimaksud dalam sistem pengendalian internal yaitu indentifikasi resiko dan analisis rasio. Yang mana penilaian resiko dilakukan dengan menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan. Setelah dilakukan penetapan tujuan maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi resiko, ini dilakukan untuk mengetahui resiko, baik dari dalam atau luar instansi yang dapat mempengaruhi

keberhasilan pencapaian tujuan. Yang kemudian analisis rasio dilakukan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah mulai dari yang kecil resikonya sampai yang paling berdampak.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh instansi pemerintah wajib menyelenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk memberikan tanggapan yang efektif dari resiko yang ada.

d) Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

e) Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.2.3.2. Tujuan Pengendalian Internal

Thahjono sebagaimana dalam Dera, (2016) mengungkapkan bahwa pengendalian internal administrasi memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta meyakinkan bahwa kebijakan manajemen telah ditaati dan dilakukan karyawan. Sedangkan untuk pengendalian internal akuntansi bertujuan agar harta kekayaan milik suatu perusahaan dapat terjaga dari adanya kecurangan dan catatan akuntansi perusahaan dapat dipercaya. Pada umumnya pihak manajemen memiliki tiga hal dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif diantaranya ialah :

- a) Rehabilitas laporan keuangan
- b) Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi
- c) Ketaatan pada hukum dan peraturan yang ada.

Begitupula dengan sistem pengendalian internal yang ada di pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat 3, tujuan sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara
- b) Keandalan pelaporan keuangan
- c) Pengamanan aset negara
- d) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

2.2.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.4.1. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan orang-orang yang berkompeten (Zulkifli, 2018).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2015: 105)

2.2.4.2. Komponen Laporan Keuangan

Didalam PSAK No. 1 Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
- f) Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya

Sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu

kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

2.2.4.3. Pengguna Laporan Keuangan

Adapun pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1) Investor

Investor memerlukan laporan keuangan untuk membantu menentukan keputusan apakah investor tersebut menahan, menjual, atau membeli

2) Karyawan

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

3) Pemberian jaminan (Kreditor)

Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah pemberi jaminan akan memberikan pinjaman.

4) Pemasok dan kreditur lain

Laporan keuangan memberikan informasi kemampuan entitas membayar liabilitas/kewajiban pada saat jatuh tempo.

5) Pelanggan

Laporan keuangan memberikan informasi kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.

6) Pemerintah

Laporan keuangan ada untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya.

7) Masyarakat

Laporan keuangan sebagai informasi untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas.

2.2.4.4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas tertentu. Dimana tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi LRA berguna dalam mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Dari LRA dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitas atau kinerja entitas. Penyajian LRA menggunakan basis kas.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan LO untuk memperoleh informasi :

- a) Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan

- b) Operasi keuangan menyeluruh yang berguna mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi
 - c) Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan keuangan secara komparatif; dan
 - d) Penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
- e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- f) Laporan Arus Kas (LAK)
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama satu periode tertentu.
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan
- Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
 - 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi mikro
 - 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
 - 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan

- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan keuangan secara umum mempunyai peranan prospektif dan prediktif yang menyediakan informasi laporan keuangan yang berguna untuk memprediksi sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Hardiansyah,2016). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu :

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi dikatakan relevan yaitu :

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*prediktive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

Adapun keterbatasan yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi yang relevan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya, untuk itu laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dapat dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.

- b. Andal

Informasi yang ada dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- 1) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- 2) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- 3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak dapat berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat di pahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyajian laporan keuangan, di dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan daerah sumber daya manusia harus memiliki kompetensi, didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, mengikuti pelatihan dan juga pendidikan, dan memiliki keterampilan dan juga pengalaman dalam bidang akuntansi, ini membuktikan seperti yang dilihat dari hasil penelitian bahwa kompetensi dasar sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Putri,Anni Mustika, 2018).

Hal yang sama juga dapat dilihat pada peneltian yang dilakukan oleh Mahardini Nikke Yusnita (2018) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpegaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dimana bila kompetensi sumber daya manusianya tinggi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya.

Bila dilihat pada pernyataan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H ₁	:	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
----------------	---	---

2.3.2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban APBD dan APBN standar akuntansi pemerintah perlu digunakan sebagai pedoman dalam penyajiannya. SAP merupakan landasan hukum bagi pemerintah dalam mengelola penerimaan, pengeluaran, dana secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat mewujudkan tercapainya akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan baik daerah maupun pusat (Rahma Kurnia, 2018). Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan, namun lain halnya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mahardini Nikke Yusnita, 2018 menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H ₂	:	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
----------------	---	--

2.3.3. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan Keuangan.

Pengendalian internal dilakukan sesuai dengan tolak ukur untuk menciptakan tatanan pemerintah yang baik. Pengendalian internal merupakan proses yang integral terhadap adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus baik oleh pimpinan, dan juga seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan akan terlaksanaka dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (Munasyir, 2015). Hasil yang dilakukan oleh Munasyir, 2015 ini menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah, 2018 yang juga menunjukkan hasil bahwa

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H ₃	:	Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan
----------------	---	---

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, (2) Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintah, dan (3) pengaruh pengendalian internal terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Ketiga pengaruh hipotesis ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah DKI Jakarta
- H₂ : Penerapan Standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta
- H₃ : Pengendali Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Pengaruh kompetensi sumber daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bagi pemerintahan yang berusaha menjalankan otonomi daerahnya sesuai dengan tuntutan masyarakat yang terus mengharapkan terbentuknya tata kelola pemerintah (*good governance*) yang baik, di mana sumber daya manusia memiliki tanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang baik, mulai dari proses awal penyajian laporan keuangan sampai hasil akhirnya.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di dalam kualitas laporan keuangan sejalan dengan diterapkannya standar akuntansi berbasis akrual yang dimulai sejak 2015, di mana laporan keuangan pemerintah yang baik ialah

laporan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pengaruh pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah meminimalkan resiko atau kesalahan pada saat membuat atau menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan pengenalian internal yang baik dalam lingkungan instansi terkait mencegah adanya kecurangan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat skema kerangka berpikir dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

